

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergeseran budaya masyarakat dari budaya tradisional dengan pertaniannya menuju masyarakat modern dengan kemajuan teknologinya memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat. Dampak itu salah satunya berupa pergeseran norma budaya masyarakat dari yang bersifat gotong royong menjadi bersifat cenderung individual. Keadaan ini dapat dilihat dari kehidupan budaya masyarakat yang ada di negara ini, terutama di daerah perkotaan.

^{Ker} Bergesernya budaya masyarakat tersebut dikarenakan adanya perubahan paradigma yang mendasar dari pola perilaku masyarakat itu sendiri. Sebagaimana Alfian (1986: vii) menyebutkan bahwa perubahan itu dikarenakan adanya transformasi sosial-budaya yang akan membawa kepada proses perubahan atau pembaharuan. Dengan adanya perubahan dan pembaharuan tersebut, tentunya masyarakat mengharapkan adanya perubahan dalam perikehidupannya juga.

Disinilah ^P peran pendidikan sangat menentukan dalam menunjang perubahan itu agar menjadi perubahan yang lebih bermakna bagi masyarakat. Ginanjar Kartasmita (1996: 282) mengemukakan: “untuk membangun masyarakat yang berkebudayaan ilmiah, peran pendidikan terutama sejak dini teramat penting. Oleh karena itu pula, pembentukan kebudayaan IPTEK harus merupakan sasaran dari upaya pendidikan yang diselenggarakan di sekolah”.

Berkenaan dengan itu, lembaga pendidikan hendaknya mampu menata diri guna mengantisipasi tuntutan masyarakat. Bentuk antisipasi yang dapat

dilakukan oleh lembaga pendidikan salah satunya berupa penataan kurikulum yang dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat tersebut (Ginanjjar Kartasasmita, 1996: 282). Guna mengakomodasi tuntutan tersebut, kurikulum hendaknya mampu menggambarkan tuntutan perkembangan peserta didik. Hal ini dikarenakan peserta didik merupakan elemen penting dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut (Hohense, Julie Bisson; Derman-Sparks, Louise, 1992) menyatakan bahwa kurikulum hendaknya mampu mengembangkan tujuan yang mencakup : (1) construction of a knowledgeable, confident self-identity; (2) comfortable, empathic interaction with people from drivers backgrounds, (3) critical thinking about bias, dan (4) ability to stand up for herself or himself, and for others, in the face of bias.

Mengacu kepada tujuan kurikulum yang diharapkan tersebut, tentu pergeseran nilai budaya masyarakat yang terjadi sekarang ini, akan dapat diantisipasi oleh pendidikan. Pendidikan memberikan antisipasi kepada pergeseran nilai-nilai budaya yang lebih baik yang didasarkan kepada pengetahuan, identitas diri, menyenangkan, interaksi empatik dengan masyarakat yang berasal dari berbagai macam latar belakangnya, bersifat kritis, kemampuan untuk memulai dari diri sendiri dan membantu orang lain.

Tujuan kurikulum semacam itu secara sadar atau tidak memberikan tuntunan kepada pengelola pendidikan untuk mampu dan sadar akan pentingnya memperhatikan kebutuhan peserta didik dan masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan dalam penerapan kurikulum yang akan disampaikan kepada mereka. Menelaah tujuan tersebut, tak ayal lagi manakala ada masyarakat yang menuntut agar sekolah mampu menjadi transformator bagi kebudayaan yang sedang berkembang di masyarakat. Hal ini dikarenakan sekolah sebagai

lembaga pendidikan akan menghasilkan anggota masyarakat yang lebih maju dan mernern dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejalan dengan harapan terhadap kurikulum di atas, New Zealand Curriculum (1998: 28) menggariskan program perencanaan kurikulum khususnya ilmu sosial ke dalam bentuk perencanaan yang dilakukan oleh guru, yaitu : (1) the need and experiences of students; (2) the achievement objectives for the standars; (3) the achievement objectives for the processes; (4) the setting; (5) the perspectives; dan (6) focus themes or topics.

Harapan-harapan di atas tentu tidak begitu saja dapat diabaikan dengan alasan di Indonesia sudah memiliki kurikulum yang dianggap standar yaitu kurikulum 1994. Jika ditelaah, kurikulum 1994 secara umum sangat memberikan beban kepada siswa untuk mampu menampung semua materi yang disediakan dari sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan. Oleh karena itu perlu kiranya dipikirkan solusi yang tepat berkenaan dengan tuntutan masyarakat tersebut.

Sekaitan dengan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang ditumpahkan terhadap kurikulum, salah satu bentuk kurikulum yang penting diperhatikan adalah berkenaan dengan kurikulum pendidikan/moral. Kurikulum pendidikan moral ini dalam kurikulum 1994 cenderung dikategorikan ke dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Artinya secara tersirat pendidikan moral sudah dikecilkan maknanya dan hanya relevan diberikan pada bidang studi PPKn dan pada bidang studi lainnya pendidikan moral kurang diberikan tempat, padahal pendidikan moral atau nilai menurut Kaswardi, (1993: 3) tidak harus merupakan suatu program atau pelajaran khusus, seperti pelajaran menggambar dan bahasa Inggris, tetapi lebih merupakan suatu dimensi dari

seluruh usaha pendidikan. Sejalan dengan pendapat di atas Dewey (Cheppy Haricahyono, 1995: 60) mengemukakan bahwa "pendidikan moral merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri. Namun, perhatian terhadap permasalahan moral musti tercakup dalam semua aspek pendidikan".

Ungkapan di atas mengindikasikan bahwa pendidikan moral bukan merupakan dominasi dari bidang studi PPKn, melainkan sebagai suatu pendidikan yang terpadu dari berbagai bidang studi. Hal ini dikarenakan pendidikan moral memberikan bekal kepada siswa untuk mampu hidup dalam dunia nyata di lingkungan masyarakatnya. Nilai dan moral yang dianut dalam kehidupan riil merupakan nilai yang esensial/utama/ penting/berharga yang dimintakan oleh masyarakat tersebut serta pada waktu tersebut. Bila sekolah/guru melupakan nilai/moral riil dan hanya membina nilai esensial yang ideal saja, maka bahaya utama kelak adalah lahirnya calon generasi penerus dan warga masyarakat yang frustrasi (Kosasih Djahiri, 1985: 21). Untuk menghindari adanya frustrasi dari para remaja (siswa) sebagai lulusan sekolah, perlu kiranya ada suatu solusi yang tepat dan dianggap mampu menjembatani antara harapan masyarakat dan kemampuan sekolah dalam membangun ^{alumni} moral generasi muda (siswa) untuk mampu menjadi anggota masyarakat yang bermoral dan berbudi pekerti sesuai dengan nilai budaya yang dianut masyarakatnya.

Bentuk solusi yang dianggap tepat adalah di sekolah hendaknya diciptakan suatu budaya yang mampu mengarahkan siswa untuk mampu menyaring dan memberdayakan berbagai kebudayaan yang ada di sekitarnya. Melalui perberdayaan berbagai kebudayaan itu, tentu para siswa akan mampu menjadi motor bagi transformasi nilai budaya yang berkembang di lingkungan

masyarakatnya. Sebagaimana Engkoswara (1999: 11-13) menyarankan hendaknya di masyarakat ditumbuhkan budaya utama yang mencakup: (1) budaya bersih dan sehat, (2) budaya disiplin, (3) budaya masa depan yang jelas, dan (4) budaya juang dan hormat menghormati. Apabila setiap manusia melaksanakan budaya utama itu dengan konsisten dan seksama, maka berbagai kejahatan di muka bumi pertiwi ini berangsur-angsur menghilang.

Fenomena yang terjadi dewasa ini banyak pranata di masyarakat kita yang sudah dan tengah, mengalami perubahan-perubahan mendasar (malah sebagian juga cukup membingungkan). Selain itu tidak sedikit nilai-nilai lama (*baca: tradisional*) yang sudah bergeser fungsi atau kedudukannya semula, terdesak oleh nilai-nilai yang dianggap modern (Cheppy, 1995: 55). Pergeseran tersebut terutama terjadi pada para remaja (*baca: siswa*) yang cenderung pada awalnya masih memegang nilai budaya tradisional, namun secara perlahan nilai yang dianutnya tersebut hampir pudar. Keadaan ini disebabkan oleh ketidakpuasaan mereka terhadap nilai-nilai lama yang dianggap lamban dan selalu ketinggalan jaman. Akibat yang ditimbulkan oleh ketidakpuasaan terhadap nilai lama adalah dapat dilihat dari semakin maraknya budaya-budaya kekerasan seperti main hakim sendiri, tawuran antar pelajar, budaya ingin menang sendiri, budaya saling mengejek dan menghina, budaya menghalalkan segala cara dan budaya-budaya lainnya yang cenderung menyimpang dari norma yang berlaku.

Pergeseran budaya tersebut, dipicu oleh bergesernya paradigma masyarakat itu sendiri. Dimana nilai-nilai budaya masa depan banyak yang belum diketahui bentuknya karena tibanya terlalu pagi. Kejadian seperti itu seringkali menimbulkan frustrasi sebagai akibat dari erosi nilai kebudayaan yang

dianutnya (Taufik Abdullah, 1994: 28). Fenomena lainnya ditemukan oleh Astrid S. Susanto-Sunarto (1998: 26) yaitu tawuran terjadi manakala anak-anak meninggalkan halaman sekolah, maka mereka terbebaskan dari pengawasan sekolah maupun pengawasan orang tua, sehingga terjadilah semacam kekosongan/vacum pengawasan. Dengan kekosongan itu, maka anak akan dengan mudah tersulut untuk mengadakan tawuran, apabila memang diinginkan oleh mereka. Bogardus (Astrid SS, 1998: 27) mengistilahkan kelompok semacam ini dengan sebutan disjunctive sosial group. Dimana orang tidak ingin berkaitan dengan kelompok lain. Kelompok ini dikategorikannya sering membuat tindakan kriminal yang sebanyak mungkin tidak dikenal karena pergerakannya dilakukan dengan secara cepat.

Hasil penelitian Kadarusmadi (1987: 146) berkenaan dengan pendidikan moral menemukan bahwa kecenderungan-kecenderungan perilaku yang diperlihatkan oleh anak didik SMA, tidak memadai untuk menyatakan bahwa pendidikan moral telah berhasil mengembangkan kemampuan afektif dan kemampuan psikomotorik anak didik. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kecenderungan perilaku anak didik belum mencerminkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai moral. Ada kecenderungan anak didik di SMA melakukan tindakan atau perbuatan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan tidak didasarkan atas kepantasan seperti yang dibutuhkan masyarakat. Indikasi temuan di atas jika ditelaah dari laporan yang dimuat dalam Media Indonesia tanggal 19 Oktober 2000 yaitu bahwa nilai-nilai luhur bangsa, khususnya pada anak-anak mulai memudar akibat banyaknya kejadian sadis belakangan ini. Disamping itu dilaporkan pula oleh Hans E Kawuluan dari FK PPAI bahwa masyarakat sekarang cenderung suka melakukan penjarahan,

perampokan, pembakaran, pembunuhan, pemerkosaan, maupun tindakan sadis lainnya. Di kalangan remaja kegiatan itu cenderung menjadi kegiatan rutin. Kegiatan tersebut biasanya diawali dengan tawuran dan perbuatan amoral lainnya. Lebih lanjut dinyatakan jika keadaan merosotnya moral belakangan ini dibiarkan tanpa ada pembinaan, mau jadi apa anak-anak yang moralnya sudah mati nanti, bangsa Indonesia akhirnya akan rugi sendiri.

Fenomena lainnya dikemukakan oleh Nyoman Naya Sujana (Surabaya Post, 2000) bahwa banyak guru dan dosen yang bersifat ragu dan bingung untuk memilih nilai-nilai budaya dan moral yang akan disosialisasikan dan ditransformasikan kepada anak-anak murid dan mahasiswanya, karena kondisi *chaostic cultur* ini. Dikemukakan pula bahwa banyak diantara orang tua dan bahkan tokoh-tokoh agama tidak menjadi referensi moral, karena mereka semakin memuja uang, materi, dan kenikmatan duniawi. Disamping itu orang tua menunjukkan perilaku yang tidak jelas dan malahan cenderung konserpatif. Akibat dari itu semua adalah terjadinya proses nihilisasi budi pekerti yang tentunya efek yang paling terasa adalah terjadinya kebebasan dan timbul anarki moral dan moral animal.

Sejalan dengan fenomena di atas, Abud Su'ud (1989: 11) mengemukakan bahwa perubahan tingkah laku masyarakat modern (industri) sangat berkaitan dengan :

Kecenderungan lain yang sangat berkaitan, ialah perubahan tata nilai hidup manusia, berupa pelanggaran terhadap etika maupun norma keagamaan. Sementara itu kemajuan teknologi dan ilmu, yang merupakan tulang punggung industrialisasi, secara ironis telah menyeret manusia dari kedudukan sebagai subyek menjadi obyek. Dalam pada itu, sekularisme telah menjadi watak yang paling menonjol dalam alam pikiran manusia industrial yang telah mendeskriditkan sisi keruhaniahan/keagamaan dari kehidupan manusia. Namun sebagian dari manusia itu sendiri telah



merasakan risi terhadap kondisi kemanusiaan itu, dan berusaha melaksanakan *rethinking*.

Ungkapan di atas mengindikasikan tentang pentingnya pendidikan moral bagi kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan pendidikan moral memiliki fungsi untuk menciptakan keharmonisan hubungan sosial, menjamin kebahagiaan rohani dan jasmani manusia, memberikan landasan kesabaran untuk dapat bertahan terhadap naluri dan keinginan nafsu, memberi daya tahan dalam menunda dorongan rendah yang mengancam harkat dan martabat manusia, memberikan motivasi dalam setiap sikap dan tindakan manusia untuk berbuat kebaikan dan kebijakan yang berlandaskan moral (ketuhanan, agama, hukum dan falsafah negara), memberikan wawasan masa depan, baik konsekuensi maupun sanksi sosial (Soeparno, 1992: 23-24).

Berdasarkan uraian di atas, dapat memberikan gambaran betapa pentingnya pendidikan moral bagi kehidupan manusia (siswa) yang didasarkan atas nilai budaya yang dianut oleh masyarakatnya. Artinya moral individu yang dianut oleh suatu masyarakat akan ditentukan oleh pergeseran nilai budaya yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Berkenaan dengan itu dalam penelitian ini akan dikembangkan suatu model kurikulum yang berkenaan dengan pendidikan moral yang didasarkan atas transformasi nilai-nilai budaya.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

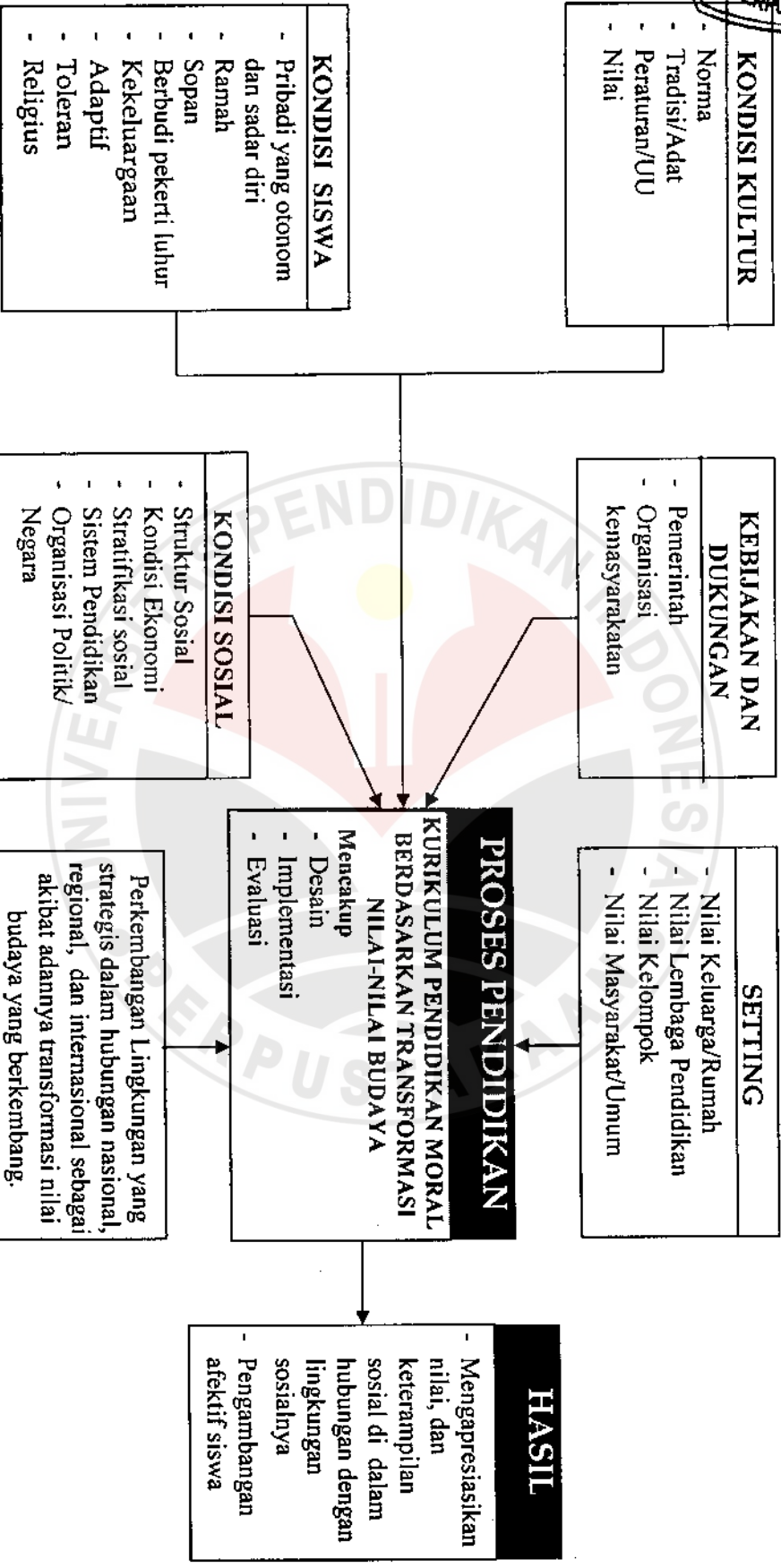
Pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki budi pekerti yang luhur (UUSPN No. 2/1989 Pasal 4), tentunya tidak akan dapat tercapai begitu saja manakala tidak ditunjang oleh adanya kurikulum yang relevan dengan tujuan itu. Kurikulum yang dimaksudkan sesuai dengan

keadaan pendidikan di Indonesia adalah kurikulum pendidikan moral (PPKn – lihat penyempurnaan/penyesuaian kurikulum 1994). Dalam kurikulum PB/SPB kurikulum 1994 untuk kelas satu catur wulan 1 dicantumkan bahwa materi yang perlu diajarkan adalah toleransi, menghargai dan cinta tanah air dan pengabdian. Sedangkan materi pada kelas dua mencakup ketaqwaan, keramah-tamahan, kesatuan, keikhlasan, dan kedisiplinan. Pokok bahasan bagi kelas tiga mencakup kerukunan, kebanggaan, ketaatan dan keadilan (Depdikbud, 2000).

Materi yang tercantum dalam kurikulum PPKn tersebut kalau dijabarkan ke dalam bentuk aktivitas yang dilakukan oleh siswa tentu tidak akan terlepas dari upaya siswa memahami lingkungannya. Hal ini dapat dilihat dari prinsip kurikulum PPKn yang mengharapkan agar siswa memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk mampu mengamalkan norma, berdisiplin dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan warga negara (Depdikbud, 2000).

Secara tersirat harapan kurikulum tersebut mengindikasikan agar materi dalam mata pelajaran PPKn harus berisikan agar siswa mampu memahami nilai-nilai yang berkembang di masyarakatnya atau yang sering dikenal dengan istilah nilai-nilai budaya. Pemahaman siswa akan nilai-nilai budaya yang diberikan dalam proses pendidikan bersumber dari adanya suatu kondisi yang mempengaruhinya. Kondisi-kondisi yang dimaksud dapat terlihat pada gambar 1.1 di halaman berikut.

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa proses pendidikan dipengaruhi oleh adanya berbagai kondisi dan setting. Kondisi yang dimaksud yaitu kondisi kultural dan kondisi sosial. Dalam kondisi kultural terdapat adanya elemen yang sangat berperan dalam mempengaruhi proses pendidikan yaitu adat istiadat atau



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Moral Berdasarkan Transformasi Nilai-nilai Budaya

tradisi, norma, nilai-nilai serta peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dilihat dari kondisi sosial, proses pendidikan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara yang cenderung selalu berubah, maraknya kondisi politik negara, serta makin kentarnya struktur dan stratifikasi sosial antara kelompok masyarakat kelas bawah, menengah dan atas. Kesemua kondisi itu merupakan manifestasi dari sistem pendidikan seperti yang tertuang dalam UUSPN No. 2 tahun 1989.

Kondisi sebagaimana disebutkan di atas, merupakan masukan bagi setting kehidupan individu, baik dalam setting keluarga, tempat kerja, ditempat umum maupun di lembaga pendidikan persekolahan. Melalui setting inilah proses pendidikan mampu memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik untuk memahami semua kondisi tersebut. Melalui pemahaman terhadap kondisi tersebut dapat diharapkan terjadinya suatu transfer pendidikan dalam bentuk perubahan perilaku siswa. Pemahaman akan kondisi dan setting tersebut akan terwujud dari hasil pendidikan. Hasil pendidikan itu termanifestasikan ke dalam bentuk pengetahuan, perilaku/ sikap dan keterampilan para siswa.

Berkaitan dengan fokus permasalahan yang berkenaan dengan pengembangan kurikulum pendidikan moral berdasarkan transformasi nilai-nilai budaya, nampak dalam gambar bahwa proses pendidikan hendaknya memperhatikan setting, kondisi sosial dan kondisi kultur dalam berbagai elemen. Makna dari itu bahwa proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah hendaknya tidak melupakan nilai-nilai, baik dalam setting umum, keluarga maupun lembaga pendidikan itu sendiri. Pemahaman akan makna nilai-nilai

dan proses pendidikan sangat diperlukan oleh individu sebagai umat manusia. Pemahaman siswa terhadap kondisi tersebut merupakan hasil dari proses pendidikan. Melalui pemahaman terhadap kondisi tersebut, diharapkan para siswa mampu memiliki sikap hidup bersama dalam damai dan harmoni (UNESCO-APNIEVE, 2000: 9).

Kemampuan siswa untuk memiliki sikap bersama dalam damai dan harmoni tersebut dapat diwujudkan dalam sikap mampu menunjukkan rasa perdamaian, demokrasi, hak-hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan (UNESCO-APNIEVE, 2000: 8-9). Penjabaran masing-masing nilai tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Hak-hak asasi manusia mencakup kesadaran menerima/menghargai, akuntabilitas, kerjasama, kebinekaan/keanekaragaman, kesamaan dan keadilan, kebebasan dan tanggungjawab, kejujuran, integritas, penghormatan atas martabat manusia dan kebenaran.
- (2) Perdamaian, mencakup mengasuh/berbagi, keharuan, pengenalan jiwa orang lain, perasaan berterima kasih, interdependensi (gotong royong), cinta kasih, spiritual (kerohanian) dan toleransi.
- (3) Demokrasi, mencakup kewarganegaraan yang aktif dan bertanggung jawab, berpikir kritis, kesamaan/persamaan, kebebasan dan tanggung jawab, keterbukaan, penghormatan atas hukum/ketertiban, disiplin diri dan solidaritas.
- (4) Pembangunan berkelanjutan, mencakup kreativitas, kesangkilan atau efisiensi, memperhatikan/kepedulian lingkungan, orientasi masa depan, kehematan, industri, ekologi pribadi, pengurus sumberdaya, dan kesederhanaan.

Teraktualisasikannya nilai-nilai tersebut oleh siswa diharapkan mampu menjadi penggerak transformasi nilai budaya dari nilai budaya yang tidak menentu ke nilai budaya yang modern yang ditandai dengan kesadaran siswa dalam melaksanakan hak asasi manusia (HAM), perdamaian, demokrasi dan melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

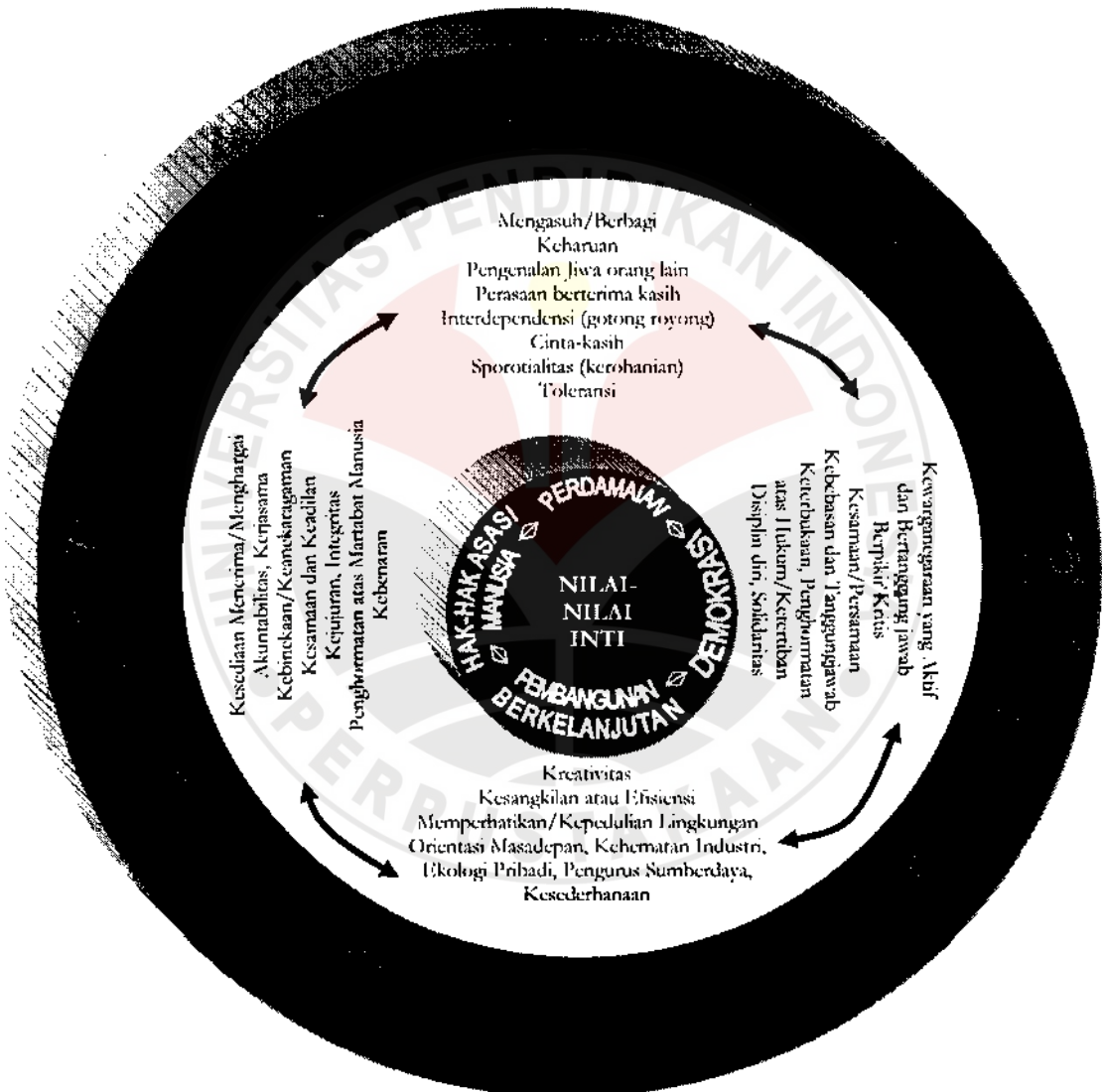
Model kurikulum yang dimaksudkan disini berkenaan dengan model kurikulum yang mampu mentransformasikan nilai-nilai budaya masyarakat ke dalam nilai-nilai pendidikan yang dapat diajarkan kepada peserta didik. Sebagaimana dikemukakan Nana Syaodih S. (1999: 161) bahwa “pemilihan model akan sangat didasarkan atas kelebihan dan kebaikan-kebaikan serta kemungkinan pencapaian hasil yang optimal, tetapi perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang dianut serta model konsep pendidikan mana yang digunakan. Artinya bahwa pengembangan model kurikulum akan sangat ditentukan oleh adanya sistem pendidikan yang berlaku serta sistem masyarakat sebagai pengguna dan sekaligus pengelola pendidikan yang ada di lingkungannya.

Nilai-nilai sebagaimana diungkapkan UNESCO tersebut, merupakan wujud materi yang hendaknya ada dan diberikan dalam pengembangan model kurikulum pendidikan moral. Model kurikulum pendidikan moral yang dikembangkan dalam penelitian ini dibatasi hanya berkenaan dengan materi mengenai nilai-nilai budaya yang mencakup perdamaian, demokrasi, hak-hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Materi yang dimaksudkan dapat diberikan dalam proses belajar mengajar seperti yang terlihat dalam gambar 2.1 berikut.

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa materi dalam proses belajar mengajar (PBM) yang berkenaan dengan nilai-nilai perdamaian, demokrasi, hak-hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan itu hendaknya dimiliki oleh siswa. Pemahaman siswa terhadap nilai-nilai tersebut, akan berimbas kepada kemampuan siswa untuk mampu bertindak sesuai dengan norma-norma atau dengan istilah lain siswa mampu belajar hidup bersama dalam

damai dan meninggalkan hal-hal anarkis yang bisa membahayakan dirinya dan lingkungannya.

Pokok Bahasan seperti yang terlihat dalam gambar 2.1 tersebut merupakan materi kajian yang akan ditelaah dalam pengembangan model kurikulum pendidikan moral berdasarkan transformasi nilai-nilai budaya.



Gambar 2.1 Diagram Skematis tentang Nilai-nilai Budaya yang diperlukan dalam Proses Belajar-Mengajar Pendidikan Moral yang Diuji Cobakan dalam Penelitian (Dimodifikasi dari UNESCO-APNIEVE, 2000: 9)

C. Definisi Operasional

Pengembangan model kurikulum pendidikan moral berdasarkan transformasi nilai-nilai budaya yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah upaya untuk menemukan desain kurikulum yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang berkenaan dengan terjadinya transformasi nilai-nilai budaya. Upaya mengembangkan desain ini dilakukan mengacu kepada kegiatan belajar mengajar yang di dalamnya mencakup materi yang berkenaan dengan perdamaian, demokrasi, hak-hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Materi tersebut merupakan aspek-aspek yang dapat dikembangkan dalam penelitian. Aspek-aspek itu menurut UNESCO-APNIEVE (2000) dapat dirinci sebagai berikut: (1) perdamaian mencakup cinta, keharuan, harmoni, toleransi, mengasuh (peduli) dan berbagi, interdependensi, pengenalan jiwa orang lain, dan rasa berterimakasih; (2) hak-hak asasi manusia mencakup: kebenaran, kesamaan dan keadilan, penghormatan pada martabat manusia, integritas, akuntabilitas, kejujuran, penerimaan/penghargaan kebhinekaan, kebebasan dan tanggungjawab, dan kerjasama; (3) demokrasi mencakup: penghormatan pada hukum dan ketertiban, kebebasan dan tanggung jawab, persamaan, disiplin diri, kewarganegaraan yang aktif dan bertanggungjawab, keterbukaan, berpikir kritis, solidaritas; dan (4) pembangunan berkelanjutan mencakup: kesangkilan, industri, orientasi ke masa depan, peduli lingkungan, pengurusan sumber daya, kreativitas, kehematan/kesederhanaan, dan ekologi pribadi.

D. Pertanyaan Penelitian

Proses belajar mengajar di sekolah mempelajari berbagai hal yang bersangkutan paut dengan kehidupan manusia, baik itu kognitif, afektif maupun psikomotorik. Guna mencapai hal tersebut, pendidikan hendaknya mampu mengejawantahkan berbagai bentuk kegiatan yang diselenggarakan di sekolah. Bentuk pengejawantahan pendidikan yang dimaksud salah satunya adalah pelaksanaan proses belajar mengajar pendidikan moral. Melalui proses belajar mengajar pendidikan moral yang diajarkan di sekolah dengan secara kontinue dan konsekuen, diharapkan para siswa akan mampu menangkal nilai budaya negatif yang terlihat sedang berkembang pada saat ini. Budaya negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa Indonesia adalah terjadinya budaya main hakim sendiri, tawuran dan perbuatan negatif lainnya yang cenderung mengabaikan moral yang dianut bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini akan dikembangkan suatu model kurikulum pendidikan moral yang didasarkan pada transformasi nilai-nilai budaya. Pengembangan model kurikulum pendidikan moral ini didasarkan atas krisis sosial budaya yang menyangkut nilai-nilai moral, yaitu krisis HAM, perdamaian, demokrasi dan pembangunan berkelanjutan (UNESCO-APNIEVE, 2000). Krisis nilai-nilai tersebut ditambah lagi dengan adanya krisis konsep tentang kesepakatan arti hidup yang baik, adanya kesenjangan kredibilitas/keteladanan, beban lembaga pendidikan terlalu besar melebihi kemampuannya, kurangnya sikap idealisme dan citra generasi muda tentang peranannya bagi masa depan bangsa, makin bergesernya sikap manusia ke arah pragmatisme yang pada gilirannya

membawa kearah materialisme dan individualisme, dan krisis dalam hubungan antar manusia (Soeparno, 1992: 35-37).

Uraian di atas, memberikan rujukan bahwa pengembangan model kurikulum pendidikan moral hendaknya mampu mengacu kepada berbagai permasalahan yang dihadapi siswa. Permasalahan itu berkaitan dengan krisis nilai-nilai budaya yang menyangkut nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat.

Mengacu kepada rumusan masalah, secara operasional dapat dijabarkan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kurikulum pendidikan moral (PPKn) 1994 pada saat ini ?
2. Kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum pendidikan moral (PPKn) 1994?
3. Bagaimanakah penerapan model kurikulum pendidikan moral berdasarkan transformasi nilai-nilai budaya yang dirasakan siswa pada mata pelajaran PPKn ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan model kurikulum pendidikan moral yang didasarkan atas nilai-nilai budaya yang dirasakan siswa. Dengan dihasilkannya satu model kurikulum pendidikan moral tersebut, diharapkan para guru mampu memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan siswa, khususnya

memberikan dampak terhadap nilai budaya siswa yang sedang berkembang pada saat sekarang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan mengenai pengembangan model kurikulum pendidikan moral berdasarkan transformasi nilai-nilai budaya. Berkenaan dengan itu, maka untuk menunjang segi keilmiahannya penelitian ini perlu memiliki sudut pandang utama yang dapat dijadikan patokan-patokan dalam pengembangan model kurikulum ini.

Meskipun sudut pandangan kurikulum digunakan sebagai pijakan dasar terhadap pengembangan model kurikulum dalam penelitian ini, tetapi tetap saja tidak bisa melupakan sudut keilmuan yang lainnya, misalnya filsafat, psikologi, sosiologis, dan religius (Sunaryo Kartadinata, 1988: 15). Oleh karena itu tak ayal lagi manakala pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini tidak hanya didasarkan kepada bukti empirik yang diperoleh semata, melainkan harus ditunjang pula oleh danya generalisasi yang bersifat logis yang dapat dijadikan prinsip bagi pengembangan model kurikulum pendidikan moral berdasarkan transformasi nilai-nilai budaya.

Mengacu kepada paparan di atas, maka hasil penelitian ini secara teoritik akan memberikan manfaat seperti berikut.

Pertama, pemahaman siswa tentang materi berkenaan dengan nilai-nilai budaya akan bersangkutan paut dengan bagaimana guru mampu

menerapkan suatu model kurikulum pendidikan moral dalam proses pembelajaran yang tepat dengan kebutuhan dan harapan siswa.

Kedua, pengungkapan terhadap aspek-aspek nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan pendidikan moral, perlu dikembangkan melalui strategi pendidikan yang cocok sesuai dengan perkembangan jaman.

Ketiga, penemuan dasar-dasar konseptual bagi pengembangan model kurikulum pendidikan moral berdasarkan transformasi nilai-nilai budaya tidak akan terlepas dari adanya upaya guru dalam memahami nilai-nilai budaya tersebut dalam kehidupannya yang diterapkan dalam model kurikulum pendidikan moral yang dikembangkan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengelola pendidikan, baik itu Kepala sekolah, guru, maupun pengelola pendidikan lainnya yang sedang berjalan saat ini.

Dari hasil penelitian diharapkan dapat diperoleh suatu model kurikulum pendidikan moral yang dirasa mampu memberikan rambu-rambu dalam menangkal terjadinya krisis moral yang berkenaan dengan terjadinya transformasi nilai budaya para siswa pada saat ini. Model yang dikembangkan ini merupakan hasil telaahan bagi para guru untuk mampu menerawang lebih dalam mengenai langkah-langkah yang cocok dan akurat dalam membantu siswa yang berhubungan dengan permasalahan nilai-nilai moral yang dianutnya yang didasarkan pada terjadinya transformasi nilai budaya siswa.

Melalui penelitian ini diharapkan terbentuk suatu model kurikulum pendidikan moral yang dapat diterapkan oleh guru dalam mengantisipasi



berbagai permasalahan yang berkenaan dengan krisis moral yang dihadapi oleh siswa. Model pengembangan kurikulum ini hendaknya mampu memuat konsep, prinsip, fakta dan prosedur yang tepat dalam membantu menanggulangi berbagai permasalahan siswa yang berkenaan dengan krisis nilai moral sebagai akibat terjadinya transformasi nilai budaya yang ada di masyarakat.

Bagi Depdiknas penelitian ini memberikan manfaat sebagai data pelengkap bagi proses pendidikan di sekolah. Manfaat yang dimaksud adalah diperolehnya satu model kurikulum pendidikan moral yang dirasa mampu memberikan rujukan yang tepat dalam mengantisipasi terjadinya pergeseran nilai budaya pada siswa. Dengan diperolehnya model kurikulum tersebut, maka pihak Depdiknas akan mampu mengejawantahkan rumusan model kurikulum pendidikan moral hipotetik yang diperoleh dalam penelitian ini.

F. Anggapan Dasar

Penelitian yang dilakukan ini bertolak dari anggapan dasar berikut.

Pertama, setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan, potensi yang dimaksudkan itu berupa pemahaman akan nilai-nilai moral yang berkembang di sekitarnya. Pemahaman terhadap nilai-nilai moral itu dapat juga dipengaruhi oleh terjadinya transformasi nilai-nilai budaya yang berkembang disekitarnya. Bagi manusia yang dilahirkan kebetulan dari lingkungan yang memiliki nilai-nilai budaya yang baik, dimungkinkan akan memiliki nilai moral yang baik dan begitu sebaliknya. Sebagaimana disitir dalam hadis Nabi bahwa setiap manusia (insan) dilahirkan dengan sifat yang murni, orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Majusi dan

Nasrani. Makna dari itu bahwa manusia (anak) -- yang beragama Islam -- akan berperilaku dengan baik atau jelek sesuai dengan agama Islam tergantung dari kedua orangtuanya (penulis mengartikan orang tua dapat dijadikan sandaran sebagai lingkungan dimana anak itu berada dan bertingkah laku).

Kedua, dalam GBHN dan UUSPN No. 2/1989 dinyatakan bahwa sebagian dari tujuan pendidikan adalah menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa, dan berbudi pekerti luhur dapat direalisasikan dengan baik, maka segala aspek yang berkenaan dengan moralitas yang diduga masih menjadi penghalang bagi pembangunan bangsa akan terpecahkan ke arah yang baik. Berkenaan dengan itu sekolah sebagai suatu lembaga penterjemah tujuan pendidikan hendaknya mampu memberikan solusi yang tepat dalam memecahkan kebuntuan pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut yang diakibatkan oleh adanya pergeseran nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia sekarang ini.

Ketiga, kurikulum yang ada dan digunakan di sekolah pada saat ini bagi sebagian kalangan dirasakan sudah ketinggalan jaman. Indikasinya dapat dilihat dari mulai terdengarnya suara-suara sumbang yang mempertanyakan mutu pendidikan. Bagi kalangan masyarakat awam, jika ada lulusan lembaga pendidikan (SMU atau PT) yang tidak bekerja setelah sekolah atau malah menjadi remaja yang suka mabuk, nongkrong-nongkrong atau melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya itu suatu pertanda bahwa sekolah telah gagal dalam mencetak lulusannya. Diperkuat lagi pada saat sekarang semakin marak anak-anak sekolah yang sering tawuran, suka membantah orang tua dan berani melawan guru sehingga istilah gurru adalah orang yang harus *digugu dan ditiru*. Disamping itu juga anak-

anak cenderung mengabaikan tiga tokoh yang semestinya dihormati dan dijunjung tinggi, yaitu *guru, ratu, wong atua karo* (Dedi Supriadi, 1998: 29).

Keempat, pendidikan moral yang dimaksudkan disini adalah berkenaan dengan kemampuan seseorang untuk memahami pertanyaan yang benar dan yang salah dalam hubungan inter-personal, antara manusia dengan manusia lainnya, yang meliputi konsep-konsep seperti harkat manusia, harga diri manusia, keadilan sosial, kepedulian terhadap sesama manusia, kesamaan hak, sikap saling menghargai, dan sebagainya. Oleh karena itu pendidikan moral yang diberikan di kelas akan lebih berhasil dan mantap bila dipertautkan dengan kehidupan di luar kelas (Sastrapratedja dalam Kaswardi, 1993).

Kelima, guna menunjang pelaksanaan pendidikan, tentu kurikulum hendaknya mampu mengejawantahkan berbagai kebutuhan siswa dan masyarakat. Subtansi kurikulum hendaknya memiliki cakupan dan urutan bagi pengembangan kompetensi siswa. Dikatakan demikian, karena perumusan kurikulum merupakan sesuatu yang mendasar sebagai suatu pedoman dalam pelaksanaan di sekolah. Melalui pengembangan kurikulum ini guru akan mampu mengukur kualitas ketercapaian rencana yang telah disusunnya dengan pencapaian keberhasilan yang telah dilaksanakannya. Begitu pula dengan penyusunan kurikulum pendidikan moral ini tidak akan terlepas dari adanya materi yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan siswa. Oleh karena itu subtansi kurikulum pendidikan moral hendaknya mencakup berbagai orientasi siswa. Materi kurikulum pendidikan moral diajarkan dengan unit fokus pada hasil (*outcome-focused*) dan didasarkan pada tujuan pengajaran (*objective-based*) bagi siswa baik dalam kelompok kecil maupun kelas.

Keenam, Dalam kaitan dengan penelitian ini, sistem nilai budaya adalah sejumlah pandangan mengenai soal-soal yang paling berharga dan bernilai dalam hidup. Oleh karena itu sistem nilai budaya menjiwai semua pedoman yang mengatur tingkah laku warga pendukung kebudayaan yang bersangkutan, pedoman tingkah laku itu adalah adat istiadatnya, sistem normanya, aturan etikanya, aturan moralnya, aturan sopan-santunya, pandangan hidup, dan ideologi pribadi (Hans J. Daeng, 2000: 45). Melihat pedoman tingkah laku itu tentunya masyarakat akan mampu membendung dan membentengi dirinya jika ada nilai budaya baru yang dianggap kurang sesuai dengan nilai budaya yang dianutnya. Untuk mampu membentengi masyarakat dengan baik, tentunya pendidikan memerlukan suatu upaya jitu yang dianggap mampu menahan laju nilai budaya yang kurang baik di masyarakat. Oleh karena itu upaya pendidikan hendaknya mengandung nilai dan memberikan pertimbangan nilai. Hal itu dikarenakan pendidikan diarahkan pada pengembangan pribadi anak agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan diharapkan masyarakat. Proses pendidikan harus bersifat membina dan mengembangkan nilai. Disamping itu pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan, tetapi menyiapkan anak untuk kehidupan dalam masyarakat. Generasi muda perlu mengenal dan memahami apa yang ada dalam masyarakat, memiliki kepercayaan, kecakapan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat, baik sebagai warga maupun sebagai karyawan (Nana Syaodih, 1999: 58-59).

Ketujuh, proses pengembangan kurikulum akan sangat persangkut paut dengan landasan yang menjadi titik tolak. Landasan pengembangan kurikulum pendidikan moral berdasarkan transformasi nilai-nilai budaya yang dijadikan

fokus penelitian ini didasarkan kepada landasan sosial dan budaya. Dimana landasan ini menekankan bahwa pengembangan kurikulum didasarkan kepada kebutuhan masyarakat yang sudah berkembang maju, sehingga kurikulum yang dikembangkan akan mampu menjadi pemandu bagi berkembangnya masyarakat dan bukan sebaliknya. Said Hamid (2000: 3) mengutip pendapat Taba (1962); Hunskins (1978); Waring (1979); Apple (1988); dan Giroux (1988) bahwa keterkaitan kurikulum dengan masyarakat sangat dianjurkan dan proses pengembangan kurikulum haruslah menjadi kebutuhan masyarakat sebagai kehidupan utama. Lebih lanjut dinyatakan bahwa untuk itu kurikulum tidak lagi harus menjadi upaya yang berkenaan dengan pengembangan manusia dalam mencapai *intellectual excellence* atau *academic excellence* semata. Kurikulum harus berkenaan dengan berbagai dimensi kehidupan yang diperlukan masyarakat.

G. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di SMU Negeri yang ada di Propinsi Jawa Barat. Adapun pembagian lokasinya adalah SMU Negeri yang ada di Kecamatan, SMU Negeri yang ada di Pinggiran Kota/Kabupaten, dan SMU Negeri yang ada di Pusat Kota/Propinsi.

Ditetapkannya Propinsi Jawa Barat sebagai daerah penelitian didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain: *Pertama*, lembaga pendidikan di Jawa Barat khususnya tingkat SMU cenderung telah tersebar diberbagai peloksok. Hal ini memungkinkan akan memberikan gambaran yang berbeda pada setiap siswa mengenai nilai budaya masyarakat yang dianutnya. Sehingga dengan begitu setiap siswa di daerah Jawa Barat akan mengalami

perbedaan dalam mentransformasikan nilai budaya yang dipahami dan dianutnya.

Kedua, Propinsi Jawa Barat merupakan salah satu propinsi yang dapat dijadikan sebagai aset pendidikan terbaik yang ada di Indonesia. Aset itu dapat berupa tersedianya lembaga pendidikan yang mampu menjadi transformator nilai budaya masyarakat yang telah dianutnya sejak dulu dan mampu mentransformator nilai baru yang dianggap baik.

Ketiga, Masyarakat di Jawa Barat memiliki berbagai macam karakteristik budaya, sehingga dimungkinkan akan berpengaruh terhadap pola pendidikan yang dianutnya.

